



KILAS KEBIJAKAN PSPK

Mengoptimalkan Peran Lembaga Akreditasi Mandiri dalam Ekosistem Pendidikan Tinggi

Allamuddin Al Faruq, Khoirunnisa, Fajri Siregar, Diyon Iskandar, Mandira B. Elmira

Pendahuluan: Fungsi Lembaga Akreditasi Mandiri dalam Proses Akreditasi

Peningkatan kualitas pendidikan tinggi telah menjadi perhatian utama khususnya di era rezim pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kualitas SDM seperti di Indonesia saat ini. Namun, seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan pendidikan, pengembangan kurikulum, hingga penyesuaian-penyesuaian tata kelola perguruan tinggi termasuk secara kelembagaannya, diperlukan badan akreditasi independen. Perguruan tinggi membutuhkan badan akreditasi yang dapat memberikan perspektif independen khususnya dari pemangku kepentingan yang menggunakan disiplin ilmu tersebut (*user*), untuk menilai kualitas pendidikan sekaligus melakukan penjaminan mutu.

Badan independen sebagai pelaksana akreditasi untuk program studi di perguruan tinggi dikenal sebagai Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), yang dapat didirikan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. LAM memiliki peran yang berbeda dengan Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT). Sebab, BAN-PT berfungsi untuk mengevaluasi perguruan tinggi secara menyeluruh di level institusi, sementara LAM menjalankan fungsi tersebut hanya di tingkat program studi.

LAM diproyeksikan berkomitmen untuk melakukan penjaminan mutu pada tingkat program studi sesuai rumpun ilmu agar dapat menciptakan penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan mensertifikasi institusi pendidikan dengan standar yang ketat dan akuntabel. Akreditasi bertujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di dalam lingkup program studi dan perguruan tinggi agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, proses Akreditasi Program Studi (APS) dilaksanakan oleh LAM.

LAM pertama yang berdiri di Indonesia adalah LAM-Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM PTKes), yakni pada tahun 2015 dengan dukungan program *Health Professional Education Quality Project* (HPEQ Project), antara tahun 2009 sampai 2014¹. Saat ini terdapat 6 (enam) Lembaga Akreditasi Mandiri yang keseluruhannya didirikan oleh masyarakat dan memiliki kekhususan rumpun keilmuan, diantaranya:

- 1. LAM Kependidikan (LAM DIK)** diprakarsai oleh asosiasi keilmuan pendidikan (sebanyak 6 lembaga) dan asosiasi penyelenggara prodi kependidikan sebanyak 7 lembaga sebagai representasi prodi sejenis yang memiliki kesamaan rumpun ilmu.
- 2. LAM Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)** yang diprakarsai oleh 3 organisasi profesi yaitu Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI).
- 3. LAM Keteknikan** yang diprakarsai oleh total 16 lembaga/institusi yang terdiri dari asosiasi keilmuan bidang teknik, asosiasi prodi sejenis, asosiasi pimpinan perguruan tinggi, dan asosiasi profesi.

¹ Lihat <https://lamptkes.org/Profil>

4. LAM Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes)

yang diprakarsai oleh total 14 lembaga/institusi baik dari asosiasi profesi, asosiasi prodi sejenis, dan asosiasi institusi dan fakultas penyelenggara pendidikan kesehatan.

5. LAM Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA)

LAMSAMA ini didirikan oleh 7 lembaga yang terdiri dari asosiasi profesi, asosiasi keilmuan, dan asosiasi penyelenggara prodi sejenis.

6. LAM Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM)

yang diprakarsai oleh 3 institusi yakni: Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM), Asosiasi Sistem Informasi Indonesia (AISINDO), dan *Indonesian Computer Electronics and Instrumentation Support Society* (IndoCEISS).

Tantangan Implementasi

Lembaga Akreditasi Mandiri secara umum berbentuk yayasan dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas program studi sesuai bidang/rumpun keilmuan sekaligus mendorong penyelenggaraan prodi yang bermutu dan memiliki tata kelola manajemen yang baik. Namun, dengan usia rata-rata yang belum melebihi sepuluh tahun, sebagian besar LAM masih dalam tahap mencari bentuk operasional terefektif maupun standar pelayanan yang memadai. Berdasarkan survei daring PSPK yang diedarkan antara Desember 2022 hingga Januari 2023, 50% responden menilai bahwa tujuan utama didirikannya LAM belum tercapai. Ini menandakan bahwa pengguna LAM, yakni para pengelola program studi, belum sepenuhnya meyakini kegunaan eksistensi LAM dalam ekosistem pendidikan tinggi.

Hal ini, kemungkinan besar, disebabkan oleh:

- 1) Pengetahuan pengelola yang terbatas pada akreditasi oleh BAN-PT.
- 2) Sebagai akibat dari poin 1, keberadaan BAN-PT dan LAM seolah tumpang tindih meski secara hakikat memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Seorang responden yang mewakili rumpun ilmu Sosial Humaniora misalnya, mengatakan bahwa LAM tidak diperlukan mengingat keberadaan BAN-PT. Hal ini menunjukkan pengetahuan yang tidak sama mengenai fungsi keberadaan LAM untuk akreditasi di tingkat program studi.
- 3) Minimnya pemahaman mengenai LAM berakibat pada keengganhan untuk membayar jasa akreditasi yang ditetapkan oleh LAM yang bersangkutan.

Perlu dicatat bahwa tidak semua rumpun ilmu sudah memiliki LAM yang telah berjalan dengan mapan, sehingga persepsi mengenai fungsi LAM dapat berbeda pada masing-masing rumpun ilmu. Keberadaan LAM juga bisa jadi kurang memperoleh pengakuan di kala program studi sudah mengajukan akreditasi internasional melalui asosiasi yang ada.

Hasil Survei PSPK mengenai Keberadaan LAM

Dari hasil survei yang kami lakukan pada bulan Desember 2022 sampai Januari 2023 kepada 35 dosen PTN dan PTS, beberapa keluhan mengenai LAM yang muncul adalah:

- Integritas dan profesionalisme asesor.
- Biaya yang terlalu mahal.
- Kurangnya sosialisasi mekanisme dan proses akreditasi.
- Belum adanya penyetaraan dengan akreditasi internasional, dan
- Standar penilaian yang terlalu kaku.

Integritas dan Profesionalisme Asesor

Integritas dan profesionalisme asesor merupakan hal yang penting dalam proses akreditasi. Asesor mempunyai peran sentral dalam melakukan asesmen dan penilaian prodi. Namun, ada anggapan proses akreditasi oleh LAM sama dengan proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) karena kedua lembaga menggunakan asesor yang sama. Padahal, idealnya asesor di LAM berbeda dengan asesor di BAN-PT untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam proses akreditasi. Hal ini dikemukakan oleh salah satu responden yang mengimbau agar proses seleksi asesor perlu dilakukan berdasarkan mekanisme kompetensi, bukan selain hanya seleksi administratif.

Biaya Akreditasi

Dalam aspek biaya, pihak kampus merasa keberatan mengalokasikan anggaran yang besar untuk melakukan akreditasi melalui LAM. Meskipun pemerintah memberikan subsidi biaya sekitar 50%, namun biaya akreditasi melalui LAM dianggap tetap terlalu mahal. Mayoritas perguruan tinggi swasta yang jumlah mahasiswanya masih sedikit,

menginginkan biaya akreditasi melalui LAM digratiskan atau dikurangi. Para pimpinan PTS berharap agar biaya akreditasi melalui LAM dapat ditanggung pemerintah seperti halnya akreditasi melalui BAN-PT. Hasil survei mengenai biaya akreditasi ditunjukkan oleh grafik berikut:

Grafik 1. Persepsi Responden Mengenai Biaya Akreditasi

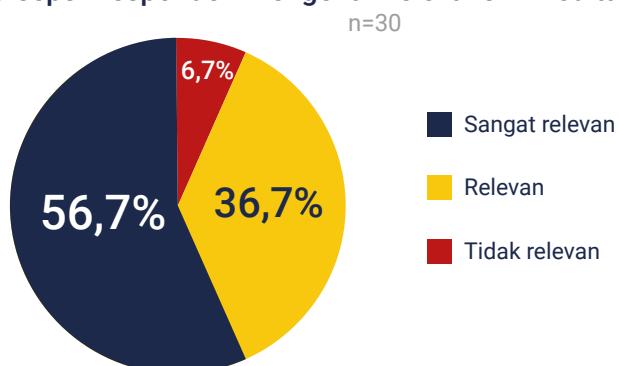


Dari hasil survei, diketahui bahwa 40% responden memilih kisaran biaya akreditasi yang sesuai dengan kemampuan finansial PT yaitu 50 s/d 60 juta, namun 25,2% responden memilih biaya akreditasi dibawah 50 juta, dan responden lainnya memilih skala biaya berbasis jumlah mahasiswa dan akreditasi secara gratis. Namun, kisaran biaya akreditasi oleh LAM saat ini masih diatas 50 juta yang artinya tidak sesuai dengan aspirasi kemampuan prodi dan PT terkait biaya akreditasi. Secara lebih rinci biaya akreditasi yang dipatok (dalam rupiah) adalah: LAMEMBA 53 juta², LAM Teknik 53 juta³, LAM DIK 52 juta⁴, LAM INFOKOM 53 juta⁵, LAMSAMA 57,5 juta⁶, dan LAM-PT Kes 65,5 s/d 80 juta⁷.

Mekanisme dan Proses Akreditasi

Perguruan tinggi belum mendapat sosialisasi terkait regulasi dan mekanisme akreditasi yang masih baru sehingga perguruan tinggi belum menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam akreditasi dan kegiatan prodi sehari-hari sejak awal. Kurangnya sosialisasi menyebabkan prodi terkesan baru menyiapkan dan melengkapi bahan-bahan yang dibutuhkan saat mendekati waktu akreditasi. Meski demikian, sebanyak 56,67% responden merasa bahwa proses akreditasi oleh LAM sangat relevan dan 6,67% cukup relevan proses akreditasi dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Grafik 2. Persepsi Responden Mengenai Relevansi Akreditasi dengan Tri Dharma



Beberapa saran terkait mekanisme dan proses akreditasi yang dirangkum dari survei yang kami lakukan pada bulan Desember 2022 sampai Januari 2023 kepada 35 dosen PTN dan PTS adalah:

“Penyelenggaraan **akreditasi** sebaiknya **dilakukan terlebih dahulu pendampingan** sehingga **PT tidak kebingungan** dalam **membuat Data Kuantitatif Program Studi (DKPS)**.”

“Sebaiknya semua **dosen** setiap **prodi** yang akan akreditasi **dilibatkan sampai akreditasi selesai** dan yang bekerja dalam akreditasi diharapkan yang memang **dosen yg bersangkutan dan bukan dosen dari prodi lain**. Jadi semua **dosen prodi** bisa **paham tentang cara proses akreditasi prodi**.”

“Proses **pelaporan evaluasi masih administratif**, dan pemberkasan/melengkapi data dukung demikian. Alangkah lebih baiknya jika **proses pelaporan-evaluasi-bukti dukung semua by sistem**.”

² Lihat <https://lamemba.or.id/persetujuan-besaran-biaya-satuan-akreditasi-program-studi/>

³ Lihat <https://lamteknik.or.id/akreditasi/biaya-akreditasi/>

⁴ Lihat <https://lamdik.or.id/2021/12/20/besar-biaya-akreditasi-dan-banding-di-lamdik/>

⁵ Lihat https://laminfokom.or.id/official/file/peraturan_2629PERLAM%20Prosedur%20Pembayaran%20Akreditasi%20LAM%20INFOKOM.pdf

⁶ Lihat <https://lamsama.or.id/wp-content/uploads/2022/03/Persetujuan-Besaran-Biaya-Akreditasi-Prodi.pdf>

⁷ Lihat <https://lamptkes.org/unduhan/29-SK-Penetapan-Biaya-Akreditasi-LAMPTKes.pdf>

Dalam hal kualitas akreditasi, saat ini akreditasi LAM belum sepenuhnya diakui asosiasi serupa dalam cakupan yang lebih luas, misalnya dalam akreditasi tingkat regional atau internasional (contoh: *Foundation for International Business Administration Accreditation/FIBAA*). Hal ini penting bagi perguruan tinggi untuk memudahkan lulusannya mendapat pekerjaan dengan standar yang mumpuni di dalam ranah profesi masing-masing.

Akreditasi Program Studi dalam Ekosistem: Memahami LAM secara Sektoral

Berdasarkan hasil survei dan wawancara yang kami lakukan, terdapat beberapa aspek implementasi akreditasi oleh LAM yang masih dapat ditingkatkan. Keberadaan LAM secara umum harus menunjang kinerja perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, terutama dalam pengelolaan program studi yang memiliki kekhasan dalam tiap rumpun ilmu.

Secara umum, menurut survei PSPK, keberadaan LAM diapresiasi karena:

- Lebih sesuai dengan keilmuan program studi.
- Penilaian lebih objektif karena dilakukan eksternal.
- Memiliki instrumen yang lebih sederhana daripada BAN-PT, namun lebih detail dalam matriks penilaian.
- Asesor memiliki kompetensi yang relevan dengan obyek yang dinilai.
- Adanya panduan, format Lembar Evaluasi Diri (LED) serta data kuantitatif setiap kriteria.

Namun, studi singkat ini juga menggarisbawahi bagaimana efektivitas peran LAM berbeda di setiap rumpun ilmu. Dalam bidang kesehatan misalnya, LAM berjalan baik karena berhasil menerjemahkan standar dan aplikasi yang diharapkan oleh pengguna akhir dari penyelenggaraan di program studi. Dengan kata lain, ekosistem pendidikan kesehatan, dengan peran asosiasi dan industri di dalamnya, berhasil merumuskan standar yang diinginkan dari dunia pendidikan kesehatan. Hal ini cukup berkebalikan dengan keberadaan LAM dalam rumpun ilmu sosial humaniora, atau pendidikan, di mana penggunanya (dunia usaha dunia industri) belum memerlukan kebakuan yang sangat tinggi sebagaimana ditunjukkan oleh dunia industri kesehatan atau industri berbasis teknologi. Praktik seperti ini belum tentu bisa disamakan dengan praktik dalam rumpun ilmu lainnya.

Dengan demikian, LAM, sebagai pihak yang menerjemahkan standar yang dibutuhkan dunia industri, asosiasi profesi ataupun pemangku kepentingan lainnya, berperan efektif jika ekosistem di mana ia berada, menunjukkan kebutuhan standar atau kebakuan tinggi. Di sinilah fungsi evaluasi program studi dalam ekosistem pendidikan tinggi.

Rekomendasi

Berikut rekomendasi PSPK untuk mengoptimalkan peran LAM dalam ekosistem pendidikan tinggi berdasarkan studi singkat yang telah dilakukan:

Keterjangkauan LAM

- 1 Penyelenggaraan akreditasi perlu disertasi rekomendasi dan pendamping PT, selain memberikan laporan hasil.
- 2 LAM perlu bekerjasama dengan asosiasi prodi dan akreditasi internasional untuk menambah cakupan pengakuan reputasinya.

Asesor

- 3 Perlunya perekrutan asesor dengan latar belakang dunia usaha, dunia kerja, dan Industri demi menunjang luaran kompetensi lulusan sesuai dengan arah *link and match*. Dalam hal ini pula, asesor perlu memiliki sertifikasi sebagai pengakuan reputasi selain dari pengalaman di penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Keberagaman standar akreditasi

- 4 Penyelenggaraan akreditasi perlu memperhatikan kondisi PT di berbagai daerah sehingga perlu keberagaman dalam standar akreditasi.

Biaya

- 5 Kemdikbudristek perlu mempertimbangkan subsidi akreditasi yang diselenggarakan LAM agar meringankan PTS dan sebagai alternatif pembiayaan tetap ada menyesuaikan jumlah mahasiswa di universitas tersebut.
- 6 Skema biaya yang masih terjangkau bagi prodi adalah sekitar Rp.20.000.000-50.000.000. Besaran ini bersifat relatif per rumpun ilmu, namun perlu ada acuan rata-rata sehingga praktik akreditasi melalui LAM tidak menjadi tambahan beban operasional program studi.

Disclaimer:

Kilas Kebijakan ini murni merefleksikan pandangan peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) berdasarkan hasil dari studi literatur dan keterlibatan langsung PSPK dalam rangka mengoptimalkan peran Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dalam ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia. Kilas Kebijakan ini dapat dikutip, disebarluaskan, dan dipergunakan untuk tujuan non-komersial.

Tentang PSPK:

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) merupakan yayasan non-profit independen yang berfokus pada penguatan kebijakan pembelajaran yang berpihak pada anak. PSPK berpijak pada data ilmiah, serta menyebarkan praktik baik di lapangan dalam ekosistem pendidikan Indonesia.



Penulis:

Allamuddin Al Faruq
Khoirunnisa
Fajri Siregar
Diyon Iskandar
Mandira B. Elmira

Editor:

Daya Cipta Sukmajati
Fany Nasution
Cindy Dayana

Desainer:

Lulu Safira